

# EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA

Oleh :

AHMAD ISA AL MUHAJIR<sup>1\*</sup>

NIM.E1012171035

Ida Rochmawati<sup>2\*</sup>, Dewi Utami<sup>2\*</sup>

\*Email : [ahmadisaalmuhajir@student.untan.ac.id](mailto:ahmadisaalmuhajir@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kegagalan kebijakan penertiban pembuangan sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang di gunakan yaitu William N. Dunn dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016 : 203) bahwa variable terpenting guna berhasilnya dalam evaluasi kebijakan ada 5 indikator , disini peneliti mengambil 5 indikator tersebut yaitu 1) Efektivitas , kesimpulannya kebijakan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun belum berhasil karena masih banyaknya warga kuburaya yang membuang sampah sembarangan, 2) Efisiensi kesimpulannya masih kurangnya sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dan membuat proses pengangkutan sampah berjalan sedikit memakan waktu, 3) Kecukupan, kesimpulannya untuk saat ini desa sungai kakap hanya memiliki 1 TPS untuk menampung sampah dan masih belum baik pelayanan persampahan, 4) Pemerataan kesimpulannya kinerja pihak dinas masih belum merata dalam sosialisasi dan masih belum terlaksana di Kuburaya, 5) Responsivitas, kebijakan yang sudah ada masih belum mendapat respon baik dari masyarakat kuburaya terhadap kebijakan yang sudah ada. Adapun saran untuk PUPR sebaiknya sebagai pelaksana kebijakan harus lebih ditingkat lagi kinerjanya terhadap kebijakan yang sudah ada supaya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang di harapkan dan diinginkan.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Kebijakan, Penertiban Sampah.*

## ABSTRACT

*This study aimed to discover and analyze the failure factors of the waste disposal management policy in Sungai Kakap Village of Sungai Kakap District. It was according to the Regional Regulation of Kuburaya Regency Number 4 of 2010. This study used the qualitative research method with a descriptive research design. This study also used William N. Dunn's theory (op. cit. Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 203) which stated that there were 5 indicators of the most important variables for success in policy evaluation, they were effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The results of this study showed that the policy that had been running for more than 10 years had not succeeded because there were still many Kuburaya community who threw garbage carelessly and there was still a lack of human resources and manpower which made the process of transporting waste a little time-consuming. The results also showed that Sungai Kakap Village currently only has 1 TPS to accommodate garbage and the waste service was still not good, the performance of the department was still uneven in socialization and had not yet been implemented in Kuburaya, and lastly, the existing policies had not received a good response from the Kuburaya community towards the existing policies. The researcher suggests that PUPR, as the implementer of the policy, must further improve its performance towards existing policies so that the policy is in accordance with what is expected and desired.*

**Keywords:** *Evaluation, Policy, Waste Management*



PONTIANAK

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tiap hari tidak terlepas dari kebutuhannya terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungan. Aktivitas manusia berjalan seiring dengan penambahan jumlah penduduk, dimana penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan salah satu komponen penting dalam timbulnya permasalahan lingkungan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang terkait dengan aktivitas manusia adalah sampah. Kegiatan manusia baik produksi maupun konsumsi akan menghasilkan sisa (buangan) yang dinamakan sampah, termasuk di Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap yang masih mengalami persoalan sampah yang belum terselesaikan dengan baik, yang sepatutnya warga sangat gampang untuk membuang sampah sembarang dan disungai serta kurang tertibnya masyarakat membuang sampah pada

jadwal yang sudah diatur dalam peraturan daerah Kuburaya

Peraturan ini dibentuk agar penertiban sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan penertiban sampah pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan daerah ini mencakup beberapa bidang, yaitu : tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib usaha tertentu dan tertib sosial. Pengelolaan sampah sendiri merupakan bagian dari tertib kebersihan seperti yang dibahas . Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa pengangkutan sampah, dalam 1 persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebang pohon-pohon, limbah dari pohon dan sebagainya yang bersifat sampah dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah dengan dipungut bayaran atau dengan membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasi nya telah ditentukan oleh pemerintah.

Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dibuat untuk mengatur masyarakat di daerah kuburaya dan khususnya di desa kakap agar tertib buang sampah di TPS(tempat pembuangan sementara) yang sudah di sediakan oleh pemerintah tetapi masih banyak warga Kabupaten Kubu Raya khususnya Desa Sungai Kakap yang tidak menaati aturan tersebut dan membuang sampahnya di sungai atau sembarangan.

Untuk jumlah TPS saat ini sebanyak 8 TPS di Kecamatan Sungai Kakap menggunakan bak Kontainer dan beberapa TPS menggunakan bak terbuka. “ Kami juga menyediakan petugas di sekitar masing masing tempat pembuangan sampah sementara.” Kata Seksi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah daerah.

Ketersediaan jumlah TPS sangat

mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penertiban sampah Kabupaten Kubu Raya begitu juga tenaga pengangkutan di setiap TPS. Sebaliknya penduduk di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap 13.888 jiwa orang yang menghasilkan sampah disetiap rumah sangat banyak. TPS Desa kakap berlokasi di Pasar Sungai Kakap berjumlah 1, jumlah tersebut belum cukup untuk mengangkut seluruh sampah yang terdapat di Desa Sungai Kakap serta masyarakat yang buang sampah sembarangan dan jika musim buah atau ada acara di desa seperti robok robok sampah tidak tertampung di TPS, mayoritas membuang sampah di sungai di karenakan kurangnya TPS untuk menampung sampah dan kurang tenaga untuk mengangkut sampah seperti petugas TPS.

Dalam menangani penanganan penertiban sampah ini pemerintah telah menyediakan 9 unit dump truk pengangkut sampah, 11 truk arm roll, 1 excavator, 1 bulldoser, 1 backhoe loader, dan 13 tossa sebagai tim penyisiran untuk menangi permasalahan sampah yang ada di

Kabupaten Kuburaya. Di Desa Kakap sendiri TPS diangkut menggunakan dump truk.

Peneliti melihat masalah-masalah dilapangan mengenai evaluasi kebijakan dan masyarakat di Kabupaten Kuburaya tepatnya di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap yang di mana di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat masalah dari kebijakan seperti belum tegaknya sanksi administratif dan masyarakat disana jadwal pembuangan sampah yang di mana sudah di jelaskan pada PERBUP jadwal pembuangan dari jam 18:00 – 06:00 pagi WIB, dan masih banyaknya masyarakat buang sembarangan seperti di bantaran sungai di tanah kosong yang jadi tempat buang masyarakat sekitar, di saat musim buah atau acara desa seperti robok robok sampah di TPS tidak cukup untuk menampung sampah sehingga tumpah keluar dari bak sampah nya dan itu mengganggu pemandangan dan memunculkan bau tidak sedap apabila melewati TPS tersebut.

## 2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Belum tegaknya sanksi administratif yang membuat efek jera
2. Masih banyaknya warga Desa Sungai Kakap melanggar membuang sampah tidak padajadwal yang ditentukan.
3. Tenaga pengangkutan sampah masih kurang.
4. Belum tercapainya target pengangkutan sampah

## 3. Fokus Penelitian

Dalam pembatasan ini, maka berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang di jelaskan di atas di fokuskan kajian dan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi kebijakan penertiban sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian identifikasi masalah dan fokus penelitian maka dapat penulis rumuskan masalah secara umum dalam penelitian yaitu “Mengapa Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap belum berhasil?”.

#### 5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kegagalan kebijakan penertiban pembuangan sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap.

#### 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti lampirkan di laporan ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai penertiban pembuangan sampah sebagai peningkatan kesadaran masyarakat

kota.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya dibidang kebijakan tentang penertiban pembuangan sampah dari aktivitas masyarakat dan bahan masukan dalam pengotimalan Penertiban Kebijakan di Kabupaten Kubu Raya

#### B. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Teori

Setiap kebijakan memerlukan langka-langka dalam mencapai tujuan, kebijakan juga dilihat sebagai sebuah pola kegiatan yang susunanya teratur sebagai langkah dari pelaksanaan fungsi evaluasi dalam kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai skala nilai atau rating, dan penilaian terhadap hasil dari sebuah kebijakan ataupun program.

Evaluasi juga diartikan sebagai salah satu bagian didalam proses kebijakan public yang memiliki tujuan untuk menilai sebuah kebijakan publik yang sedang berjalan, bahkan suatu tujuan untuk

menilai sebuah kebijakan publik yang sedang berjalan, bahkan suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan apakah berhasil mencapai tujuan, sasaran serta dampak dari sebuah kebijakan untuk kepentingan bersama.

Menurut William N. Dunn (dalam Dedy Mulyadi 2016 : 608) evaluasi kebijakan merupakan sebuah gambaran bahwa dari pelaksanaan dinilai berdasarkan informasi yang diterima dan diperoleh langsung di lapangan. Adapun evaluasi kebijakan dengan tujuan, melihat tingkat kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran mengetahui pemanfaatan dan dana yang digunakan oleh suatu kebijakan serta mengukur dampak suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik memiliki pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi dalam kebijakan dan mengevaluasi sebuah kebijakan dibutuhkan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi dengan tujuan mengetahui dampak yang diinginkan dari sebuah kebijakan, menilai sebuah kebijakan, dan melihat tingkat

keberhasilan dari sebuah kebijakan itu sendiri.

Adapun pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan secara umum, menurut William N. Dunn (dalam Rahayu Kusuma Dewi, 2016 :203) sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu hasil yang diinginkan telah tercapai William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan publik, dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, kebijakan tersebut tidak efektif dan harus diperbaiki atau dihapuskan.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila sasaran yang ingin

dicapai oleh suatu kebijakan publik sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kecukupan dalam kebijakan public adalah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau

kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

- d. Perataan, yaitu biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda. Perataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

- e. Responsivitas, yaitu hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan public atas penerapan suatu kebijakan.

## 2. Alur Pikir Penelitian

Masalah yang terjadi yang berbanding terbalik dari tujuan kebijakan yang terjadi merupakan

salah satu contoh ketidakberhasilan kinerja sebuah kebijakan daerah yang pada hal ini adalah kebijakan penertiban pembuangan sampah Kabupaten Kubu Raya. Penulis mencoba mengkaji dan menggali faktor yang mempengaruhi mengapa suatu kebijakan tidak yang lama di evaluasi kembali dengan baik. Maka dari itu untuk mengkaji masalah-masalah yang terjadi tersebut, penulis Indikator keberhasilan menurut William N. Dunn (dalam Rahayu Kusuma Dewi, 2016 :203)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan

Evaluasi Kebijakan Penertiban Pembuangan sampah Di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya



### C. METODE PENELITIAN

Evaluasi Kebij

Pembuangan Sampah Di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya :

1. Belum tegaknya sanksi administratif yang membuat efek jera
2. Masih banyaknya warga Desa Sungai Kakap melanggar membuang sampah tidak pada jadwal yang ditentukan.
3. Tenaga pengangkutan sampah masih kurang.
4. Belum tercapainya target pengangkutan sampah

Indikator keberhasilan menurut William N. Dunn (dalam Rahayu Kusuma Dewi, 2016 :203)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas

### OUTPUT

Tertib dan bersihnya Desa Sungai Kakap

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dan studi kepustakaan dengan alasan agar dapat menggali informasi yang mengenai evaluasi kebijakan penertiban pembuangan sampah.

Menurut Sugiyono (2010: 21) mengemukakan bahwa Penelitian Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada dilapangan saat penelitian dilakukan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan evaluasi kebijakan penertiban pembuangan sampah secara mendalam di desa sungai kakap kecamatan sungai kakap.

Dalam penelitian ini, instrumen yang penulis gunakan yaitu pedoman wawancara, panduan observasi dan alat dokumentasi berupa handphone, kamera dan CD. Data yang

diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009) yaitu wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2010, 127) Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Dengan Triangulasi Sumber, penulis dapat menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh baik dalam jangka pendek maupun jangka, menengah, maupun jangka panjang. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan adalah penting. Keberhasilan suatu kebijakan dapat ditentukan dari tercapai atau tidaknya ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat. Untuk itu diperlukan peran yang maksimal dari para

implementor untuk mengaplikasikan isi dari kebijakan yang telah dibuat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum yaitu tertib kebersihan bahwa yang ingin di capai dari kebijakan tersebut adalah kebersihan lingkungan yang menjadi kabupaten tempat yang nyaman rukun dalam rumah tangga, dan dalam kebijakan ini diharapkan dapat membawa kabupaten kuburaya menjadi baik dan tidak khawatir disaat banjir sampah menumpuk dan menjadi bau tidak enak untk dilihat menurut penelitian tujuan ini sudah tepat cuman masih belum maksomial dalam penerapan kebijakan tersebut.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Efektivitas**

William N. Dun menyatakan bahwa Efektivitas berkaitan dengan alternatif- alternatif dalam kebijakan mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan sudah tercapai, berdasarkan tindakan yang dilakukan. Yang bisa dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan teknis yang di lakukan menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas juga berkaitan dengan waktu yang sudah ditetapkan yang artinya apakah dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan tersebut sudah baik atau belum, tergantung pada tugas diselesaikan atau belum diselsaikan.

efektivitas pelaksanaan penertiban sampah di Desa Sungai Kakap sudah berusaha optimal dari pihak Desa Sungai Kakap dan pihak Dinas PUPR. Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif karena dalam pengeksesiannya kebijakannya sebenarnya peran masyarakat sangat diperlukan. Diketahui, masyarakat Desa Sungai Kakap masih banyak yang membuang sampah sembarangan karena disebabkan oleh TPS yang disediakan oleh Dinas PUPR hanya 1 saja yang letaknya di sekitar pasar.

Dengan kurang nya ketersediaan TPS serta masih banyak nya penanganan sampah yang belum di laksanakan masyarakat desa kakap membuang sampah sembarangan di

sungai, atau di lahan-lahan kosong, untuk itu perlu usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait supaya memfasilitasi sarana dan prasarana, koordinasi ke pihak desa agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar.

## 2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi saling berkaitan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak dilaksanakan.

Dalam upaya dapat menyeimbangkan melalui ketersediaan dana, sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan kebijakan. Peneliti menyimpulkan

bahwa dalam penertiban pembuangan sampah Desa Kakap belum efisien dilaksanakan, hal ini karena terbatasnya jumlah ketersediaan alat pengangkutan sampah, ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang, dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Upaya juga sudah dilakukan oleh pihak Dinas PUPR dalam melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana untuk mengurangi biaya pengeluaran membeli alat pengangkutan sampah yang baru.

Dan untuk instansi terkait yaitu Dinas PUPR untuk segera merealisasikan pengadaan alat atau penambahan TPS atau TPS3R untuk menangani masalah sampah di Kuburaya dan tidak hentinya memberikan sosialisasi rutin dalam penertiban sampah. Melakukan pelatihan masyarakat di Kuburaya juga perlu agar sampah tidak hanya di buang, tapi bisa di olah serta memfasilitasi tempat untuk penjualan produk-produk daur ulang sampah tersebut. Supaya sampah tidak lagi jadi masalah tapi menjadi pemasukan untuk masyarakat dan pemasukan daerah

### 3. Kecukupan

Menurut Dunn kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan kepada suatu instansi untuk menyelesaikan kewajibannya tidak terlapas dari proses penilain akhir.

Kecukupan dalam hal ini berkaitan dengan penertiban sampah yang di lakukan oleh Dinas PUPR Bidang kebersihan, suatu hal yang dikatakan cukup apabila tugas oleh instansi terkait ini berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten kuburaya. Adapun hal-hal yang dikatakan cukup dalam penertiban pembuangan sampah yaitu, tertibnya masyarakat membuang sampah di TPS, teratasinya volume sampah yang meningkat, terwujudnya tujuan dari perda nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum ,yaitu tertib

kebersihan dalam membuang sampah di Desa Sungai Kakap.

Untuk kelayakan TPS dan dan kecukupan TPS, peneliti menyimpulkan dari pernyataan-pertanyaan di atas bahwa ada beberapa daerah di Kuburaya belum cukup TPS karena terkendala dana, dan perlu adanya koordinasi dari pihak Desa agar bersinergi dalam menangani masalah sampah serta perlu adanya penambahan TPS di beberapa titik yang ditentukan dan itu perlu di kaji, upaya untuk penambahan TPS bukanlah hal mudah dan untuk kedepannya pihak Dinas PUPR mempunyai konsep dalam menangani masalah sampah yaitu konsep pemberdayaan masyarakat atau TPS 3R dalam meminimalisi rmasalah sampah.

Dinas PUPR Kuburaya harus melakukan peninjauan kembali dan perhitungan ulang anggaran dana dan SDM yang diperlukan berapa banyak untuk meminimalkan biaya supaya daerah yang tadinya belum ada TPS atau kurangnya TPS dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang riil, dan segera melaksanakan

konsep TPS 3R supaya masyarakat berperan aktif.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang berikan dengan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang diakibatkan atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program atau kebijakan akan dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaa tmerata. Beberapa cara untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, yaitu 1) memaksimalkan kesejahteraan individu, 2) melindungi kesejahteraan minimum, 3) memaksimalkan kesejahteraan bersih).

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerataan masih belum dilakukan secara menyeluruh dalam sosialisasi penertiban sampah oleh pihak Desa maupun pihak Dinas PUPR. Terutama terhadap penempatan TPS, yang di mana pembangunan TPS biasanya mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Yang menjadi kendala adalah wilayah yang memerlukan transportasi air yang

susah buat dijangkau sehingga penumpukan sampah terjadi di TPS terdekat menimbulkan bau tidak sedap dan tidak enak untuk dilihat. banyak yang harus dibenahi mengenai pemerataan TPS agar penanganan masalah sampah dapat dilakukan.

Dinas PUPR Kuburaya Seharusnya segera merealisasikan TPS 3R dan memfasilitasi supaya daerah yang susah di jangkau seperti memerlukan tranportasi air dapat menangani masalah sampahnya sendiri tidak harus di angkut lagi dari daerah yang susah di jangkau tersebut terus di buang di TPS kemudian baru di angkut ke TPA dan itu sangat tidak efektif dalam menangani masalah sampah. Denganadanya TPS 3R iniwarga di daerah yang susah di jangkauan tersebut warga di daerahnya dapat menangani masalah sampah dan mengelolah sampah yang ada di daerahnya.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat tertentu. Kemudian Dunn mengatakan criteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua criteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan program organisasi. Sedangkan data masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan yang dituju, namun berhubungan dengan tanggapan untuk mendengarkan, baik itu keluhan, pengaduan atau bahkan penilaian yang baik

Kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat tertib

dalam membuang sampah. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih sering mengingatkan tentang masalah sampah, supaya masyarakat tahu, peran serta masyarakat juga penting dalam mengurangi sampah dibuang sembarangan yang seharusnya dibuang TPS lalu masuk ke TPA.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menangani masalah dan mengurangi sampah yang bertebaran tidak terlepas dengan belum optimalnya peranan pemerintah daerah dalam memberikan motivasi dan sosialisasi atas peran serta masyarakat. Rendahnya peran serta masyarakat ini untuk ikut tertib dalam membuang sampah dan berpartisipasi dalam mengurangi jumlah volume sampah supaya dana operasionalnya lebih terjangkau dengan begitu dana bias dipakai ke hal yang lebih dibutuhkan misalnya dalam pembelian alat pengangkutan sampah baru dan memperbaharui teknik pengelolaan sampah

Untuk Kedepannya Dinas PUPR lebih responsive mendengarkan dalam keluhan keluhan masyarakat dan cepat tanggap dalam merespon

masalah sampah ini dan tidak hanya berfokus sosialisasi tapi juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengelola sampah-sampah agar bisa di daur ulang dan memilah sampah organik dan non organik supaya sampah organik dapat dijadikan pupuk dan non organik di jadikan barang daur ulang yang dapat dijual kembali.

## **E. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantara sebagai berikut:

#### **1. Efektivitas**

Tingkat efektivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum dikatakan efektif atau berhasil karena masih banyaknya masyarakat buang sampah di sungai atau sembarangan, kurang TPS ,dalam menjadikan sampah sebagai sumber daya,dan pengumpulan sampah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku melewati jam yang

telah ditentukan,pengangkutan yang belum maksimal karena warga buang sembarangan dan belum adanya pengelolaan sampah di desa sungai kakap.

#### **2. Efisiensi**

Tingkat efisiensi yang dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam penertiban pembuangan sampah masih belum dikatakan efisien, dikarenakan kurangnya ketersediaan alat pengangkutan sampah, kurangnya sumber daya manusia dan dana. Dan kurangnya sarana dan prasarana seperti, TPS 3R di Desa Sungai Kakap, sehingga pada saat sampah sampai ke TPS harus dipilah lagi oleh instansi terkait Hal ini tentunya mengambat proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

#### **3. Kecukupan**

Tingkat kecukupan yang dilaksana oleh Dinas PUPR mengenai kecukupan TPS di Kuburaya belum melaksanakan

tugasnya secara keseluruhan dalam menyediakan TPS-TPS di Kuburaya. Dan saat peneliti melakukan observasi di Kakap benar kenyataanya TPS yang tersedia di Desa kakap cuman 1 dan itu bisa dikatakan tidak cukup dalam menampung sampah untuk desa. Begitu pula untuk wilayah yang belum terlayani seperti melewati sarana transportasi air.

#### 4. Pemerataan

Dalam pemerataan TPS di Kuburaya belum secara merata dan sosialisasi belum menyeluruh dilakukan oleh Dinas PUPR yang dimana sosialisasi bisa dilakukan melewati darat dan untuk wilayah melewati transportasi air belum dilaksanakan, namun semuanya butuh waktu, biaya, dan tenaga untuk tercapainya tujuan tersebut.

#### 5. Responsivitas

Tingkat responsivitas (tanggapan) masyarakat terhadap Dinas PUPR dalam melayani dan menertibkan masyarakat di Kuburaya khususnya belum menuai hasil yang baik dan respon positif.

Masih banyak catatan penting untuk Dinas PUPR yaitu untuk menyadarkan masyarakat dalam mengindahkan aturan tentang penertiban sampah hasilnya dapat lebih maksimal lagi.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tentang Keteriban Umum yaitu Tertib Kebersihan Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagaiberikut :

1. Meningkatkan efektivitas dalam bentuk menyediakan sarana dan prasana, dan tidak bosan untuk mengedukasi, sosialisasi masyarakat tentang tertib membuang sampah dan penanganan masalah sampah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat supaya tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan.

2. Meningkatkan efisiensi dengan upaya pengoptimalan biaya retribusi dalam menangani masalah pelayanan persampahan di Kuburaya.
3. Meningkatkan kecukupan dalam membangun TPS di beberapa titik lainnya, dan membangun bank sampah sesuai dengan jenis sampah supaya nantinya tidak susah memilah sampah yang bisa di daur ulang, melakukan sosialisasi lebih sering mengenai pentingnya untuk mematuhi peraturan mengenai peraturan jadwal pembuangan sampah. Selain itu petugas kebersihan dapat di tambahkan supaya dapat melayani kecamatan atau desa yang belum terlayani agar tidak lagi adanya masyarakat buang sampah sembarangan.
4. Meningkatkan pemerataan dengan upaya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak desa supaya tidak mengundang pro dan kontra terhadap penempatan atau pemindah TPS bagi pemilik tanah atau lahan supaya tidak menjadi masalah kedepannya.
5. Meningkatkan responsivitas dengan, memberikan pengetahuan dan pentingnya partisipasi masyarakat di setiap kecamatan atau desa dalam tertibnya membuang sampah, menyiapkan sarana tempat pengaduan berupa kotak saran, sehingga pada pelaksanaannya masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan maupun aspirasi melalui kotak saran tersebut, dengan catatan kotak saran di tempatkan di titik yang mudah untuk dijangkau dan merata di kawasan

pemukiman penduduk.  
Memberikan tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak mengindahkan larangan untuk tertib membuang sampah sembarangan dan tidak tepat pada waktunya.

## F. REFERENSI

### Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. ALFABETA
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Pendekatan : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif edisi Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Kebijakan Analisis*. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA
- Haro, Ayu. 2004 *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Publik*. Medan: Skripsi
- Hartyo, Samuel Eliakim Erdik. 2020 "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang". Skripsi Universitas Tanjungpura
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Gaung Perseda Pres
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. ALFABETA
- Moleong, Lexy .J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : CV. ALFABETA
- , 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. ALFABETA.
- , 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. ALFABETA
- , 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. ALFABETA
- Yulida, Emiliana. 2019 "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara". Skripsi Universitas Tanjungpura.

